

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2019-2024**

- 1 INSTANSI : Sekretariat Daerah
 2 TUJUAN : Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah
 3 TUGAS : Membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
 4 FUNGSI : 1. Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah
 2. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah
 3 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah
 4. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Nilai EKPPD	EKPPD dilakukan dengan cara menilai kinerja tingkat pengambilan keputusan, yaitu Kepala Daerah dan DPRD dan tingkat pelaksanaan kebijakan daerah yaitu Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sumber informasi utama EKPPD adalah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang disampaikan kepala daerah kepada pemerintah. Selain itu apabila dipandang perlu, evaluasi dapat juga menggunakan sumber informasi tambahan dari laporan lain baik yang berasal dari sistem informasi pemerintah, laporan pemerintahan daerah atas permintaan Pemerintah, tanggapan atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ), maupun laporan dari masyarakat. EKPPD dilaksanakan dengan mengintegrasikan pengukuran kinerja yang dilaksanakan oleh Tim Nasional EKPPD dan Tim Daerah EKPPD, serta pengukuran oleh pemerintahan daerah (pengukuran kinerja mandiri, self assessment) yang dilaksanakan oleh Tim Penilai	RPJMD	Bagian Pemerintah dan Otonomi Daerah
		2. Persentase rumusan yang menjadi kebijakan daerah; a. Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah b. Bidang Kesra c. Bidang Hukum d. Bidang Perekonomian e. Bidang Barjas f. Bidang Pembangunan g. Bidang Organisasi h. Bidang Humas i. Bidang Umum	= (jumlah kebijakan daerah / jumlah rumusan kebijakan) x 100%		Semua Bagian
		3. Nilai SAKIP	=Perencanaan Kinerja (30%) +pengukuran kinerja (25%)+pelaporan kinerja (15%)+Evaluasi Internal(10)+Capaian Kinerja(20%)		Bagian Organisasi

2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	4. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	$IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsus}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \frac{\text{Nilai penimbang}}$	Bagian Organisasi
3	Meningkatnya peran koordinasi dalam pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif	7. Persentase kebijakan ekonomi daerah yang diimplementasikan	=(realisasi kebijakan ekonomi daerah yang diimplementasikan/kebijakan ekonomi daerah) x 100%;	Bagian Perekonomian

Sampang, 02 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH



PUHUT BUDI SANTOSO, SH, M.S

Pembina Utama Madya
NIP. 19610114 198603 1 008

